

## Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tulungagung Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Onny Setiani<sup>2</sup>, Suharyanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa MIL Undip

<sup>2</sup>Dosen MKL Undip

<sup>3</sup>Dosen MTS Undip

### ABSTRAK

Guna merangsang dan mengarahkan peran serta organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam partisipasi pembangunan, peran pemerintah harus dikurangi. Penelitian bertujuan untuk melakukan kajian terhadap tingkat partisipasi masyarakat di 5 lokasi Program SLBM di Tulungagung. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif deskriptif. variabel diamati yaitu : prakarsa, pembiayaan, pengambilan keputusan, kemampuan mobilisasi tenaga, kemampuan menyelesaikan masalah,

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ditemukan Partisipasi masyarakat dalam fenomena prakarsa pada tingkatan *placation* karena masyarakat dapat mengusulkan kegiatan namun dalam beberapa hal keputusan ada di tangan pemerintah, kecuali Beji di tingkat *Consultation*, meskipun Pemerintah minta ide masyarakat keputusan di Pemerintah. Sedangkan untuk kriteria pemetaan swadaya berada pada level *partnership atau kemitraan* karena pada tahapan ini masyarakat dapat melakukan kegiatan pemetaan swadaya sendiri namun tetap mengikuti aturan yang ada. Sedangkan Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan rata-rata berada pada tingkat *consultation* karena masyarakat mulai ikut membiayai meskipun dalam porsi yang masih sangat kecil. Partisipasi masyarakat dalam mobilisasi tenaga pada saat rapat di Desa Beji dan Karangwaru berada pada tingkat *delegated power*, sedangkan untuk Sembung dan Kampungdalem pada tingkat *partnership*. Sedangkan pada pelaksanaan fisik pada kelima lokasi berada pada tingkat *delegated power*. Partisipasi masyarakat pada penyelesaian masalah pada kelima lokasi berada pada tingkat *Partnership*.

Rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah pentingnya dukungan pada tahap pemeliharaan dan pengawasan untuk menjamin terpeliharanya fungsi-fungsi prasarana yang sudah terbangun. Peran Pemerintah sebagai fasilitator sudah menjadi keharusan dalam melaksanakan suatu program. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas fasilitator lapangan terutama fasilitator yang direkrut dari masyarakat untuk menggerakkan masyarakat.

**Kata kunci:** SLBM, Partisipasi, Prakarsa, Pembiayaan, Pengambilan Keputusan, Mobilitas Tenaga, Penyelesaian Masalah

### 1. PENGANTAR

Kota merupakan pusat berbagai aktivitas ekonomi, perdagangan maupun pendidikan, sehingga memberikan konsekuensi bahwa sebagian besar kegiatan manusia berada di perkotaan, bahkan menjadikan semakin banyaknya pendatang yang menambah permasalahan-permasalahan kota sehingga menjadi makin kompleks. Konsekuensi dari perkembangan kota adalah penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Untuk membangun infrastruktur serta layanan public tersebut tentunya membutuhkan pembiayaan

Dengan kondisi keterbatasan pembiayaan pemerintah tersebut, maka seharusnya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana Perkotaan semakin lama harus dikurangi untuk merangsang dan mengarahkan peran organisasi non pemerintah (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam partisipasi pembangunan. Sehingga masyarakat bisa lebih mandiri dalam merencanakan, membangun dan mengelola serta memelihara prasarana yang dibutuhkannya.

Dalam penanganan masalah sanitasi khususnya sanitasi perkotaan Pemerintah telah menerapkan Program SLBM (sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat), dalam pelaksanaannya terlihat adanya kontradiksi pendekatan yang dilakukan Pemerintah secara umum dengan SLBM, dimana dalam program SLBM tersebut, pelibatan masyarakat secara aktif dari awal pelaksanaan sampai dengan tahap pasca konstruksi (*bottom up*), khususnya dalam operasi dan pemeliharaannya. Sedangkan untuk pembangunan prasarana sanitasi yang secara umum dilaksanakan oleh pemerintah selama ini dianggap sebagai proyek 'pemberian' saja, karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh (*top down*). Proses perencanaan sampai dengan pembangunan prasarana sanitasi yang dilakukan kurang mengakomodir keinginan dan urgensi kebutuhan masyarakat. Untuk itulah, dalam penelitian ini akan dikaji tingkat partisipasi masyarakat di 5 lokasi Program SLBM di Tulungagung.

### 2. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan FGD dengan masyarakat, wawancara mendalam sekaligus observasi langsung di lokasi untuk memperoleh data baik data primer maupun data sekunder. Partisipasi dianalisis secara kualitatif mengacu pada teori Arnstein, 1969, ditinjau dari aspek prakarsa, pembiayaan, mobilisasi tenaga, penyelesaian masalah

### 3. HASIL DAN DISKUSI

### 3.1. Gambaran Umum Lokasi

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Tulungagung khususnya di Kelurahan Sembung, Kelurahan Karangwaru dan Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Tulungagung serta Desa Beji Kecamatan Boyolangu. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas keberadaan 4 Desa/Kelurahan dimaksud sebagai Kelurahan-kelurahan yang memperoleh program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) pada tahap awal yaitu tahun 2011.

Secara umum Kelurahan Kampungdalem, Karangwaru, Sembung dan Desa Beji mayoritas penduduknya adalah penduduk asli suku Jawa. Adapun jumlah penduduk di masing-masing Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

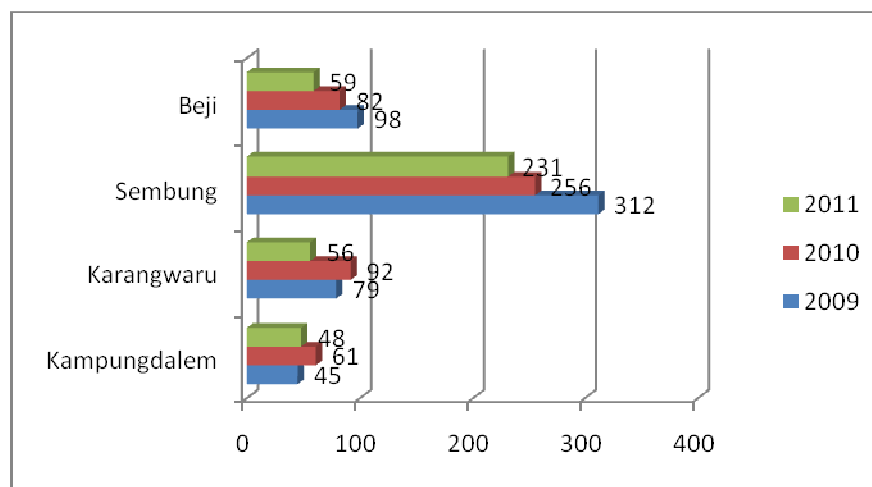
Tabel 1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kelurahan Kampungdalem, Karangwaru, Sembung dan Desa Beji

Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk		
	L	P	Jumlah
Kampungdalem	1.632	1.680	3.312
Karangwaru	2.768	2.812	5.580
Sembung	1.677	1.780	3.457
Beji	3.381	3.348	6.728

Sumber : Kecamatan Dalam Angka (2011)

Adapun dilihat dari aspek Mata pencaharian, penduduk di Kelurahan Kampungdalem, Karangwaru, Sembung sebagian besar diantaranya bekerja di sektor Perdagangan, dan Industri, serta Jasa, untuk mata pencaharian di sektor pertanian hanya di temukan di sebagian penduduk di Desa Beji dan Sembung. Ditinjau dari aspek ekonomi khususnya untuk tingkat Kemiskinan tertinggi di wilayah sembung sebesar 16,68 %, Karangwaru 16,10 %, Beji 15,61% dan Kampungdalem 13, 59 %.

Sedangkan untuk tingkat kesehatan ditinjau dari penyakit karena sanitasi khususnya diare menunjukkan bahwa angka tertinggi untuk diare berada di Kelurahan Sembung, namun demikian secara umum tren kejadian diare di wilayah Program SLBM menurun dari tahun ketahun, Adapun data diare secara rinci adalah sebagai berikut :



### 3.2. SLBM di Kabupaten Tulungagung

Program SLBM di Tulungagung dilaksanakan mulai tahun 2011 dengan lokasi yang terpilih sebanyak 5 lokasi, adapun untuk penentuan lokasi dilakukan dengan mengacu pada aturan yang tertuang pada Petunjuk Teknis baik ditinjau dari aspek tingkat kerawanan sanitasi di masing-masing lokasi kepadatan maupun persyaratan teknis lainnya. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program SLBM di Kabupaten Tulungagung, antara lain:

- Penentuan /seleksi lokasi
- Sosialisasi
- Seleksi Kampung melalui metode RPA
- Pembentukan KSM
- Penyusunan RKM
- Pelatihan

- Pelaksanaan Konstruksi
- Operasional dan Pemeliharaan
- Pengawasan

### 3.3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor diluar dan kebijakan yang berpengaruh pada keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu program, terutama program yang berbasis masyarakat. Untuk itu pada penelitian ini diuraikan dan dibahas rinci partisipasi masyarakat dari aspek prakarsa, pembiayaan, mobilitas tenaga, penyelesaian masalah pada pelaksanaan Program SLBM

#### 1. Prakarsa

Dalam pengelolaan lingkungan dna pengembangan sarana sanitasi, aspek prakarsa merupakan aspek penting karena dengan prakarsa akan menentukan tingkat keterlibatan masyarakat selanjutnya. Dalam penelitian, prakarsa dilihat dari penentuan ide awal dan pemetaan swadaya.

##### a. Penentuan Ide Awal

Penentuan ide awal masing-masing kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Penentuan Ide Awal Kegiatan

Nama KSM	Kegiatan	Lokasi	Penentuan ide awal
Kelurahan Kampungdalem “Podho Nggawe”	Pembangunan sarana MCK +	RW 2 RT 3	Masyarakat
Kelurahan Karangwaru “Estu”	Pembangunan sarana MCK ++	RW 7 RT 4,5	Masyarakat
Kelurahan Sembung “ Kalisong Guyub Rukun”	Pembangunan sarana IPAL	RW 3 RT 4	Masyarakat
Desa Beji” Guyub Rukun”	Pembangunan sarana MCK	RW 3 RT 2	Pemerintah & Masyarakat
Desa Beji “ Karya Bersama”	Pembangunan sarana IPAL	RW 4 RT 1,2,3	Pemerintah & Masyarakat

Sumber : Hasil penelitian (2012)

Pada prinsipnya untuk penentuan ide awal pembangunan sarana sanitasi di tiga kelurahan yaitu Karangwaru, Kampungdalem, sembung adalah berdasarkan keinginan masyarakat, dimana ide ini muncul pada saat pertemuan seleksi kampung yang dilakukan di Desa Beji. Dimana pada saat pelaksanaan wakil dari masyarakat berproses dalam pemetaan sanitasi dan penentuan prioritas kebutuhan sanitasi yang diharapkan di masing-masing Kelurahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fasilitator Pemberdayaan (18 Agustus 2012) yang mengatakan:

*“Untuk kegiatan yang menentukan masyarakat mbak berdasarkan hasil musyawarah atau rembug bersama”*

Sedangkan untuk peran pemerintah dan pihak lain seperti fasilitator dalam penentuan ide awal kegiatan SLBM hanyalah untuk memfasilitasi saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fasilitator Teknik Ari Wibowo, ST (13 Juli 2012) yang mengatakan:

*“ Program DAK Sanitasi merupakan program berbasis masyarakat, jadi semuanya yang melaksanakan masyarakat mulai dari ide awalnya sampai dengan pembangunan dan pengelolaan. Kita hanya memberikan fasilitasi .”*

Namun demikian untuk Desa Beji berdasarkan dari penjelasan Bpk Karyanto (6 Juli 2012), adalah sebagai berikut :

*Awale ada informasi dari PU, yang jelas pada waktu itu pk yumar bilang ada program dari Pusat, sanitasi di daerah miskin, kita harus mencari lahan. Dan kami diberi ipal, terus saya pesen kalo ada mck, beji siap. Sehingga akhirnya kita dapat 2, Sebenarnya sudah ada jamban, tapi jarak antara rumah dan sumur lima meter ndak ada sehingga jadinya khan ndak sehat”*

Dari uraian di atas, jika dibandingkan dengan teori Arnstein maka tingkatan partisipasi untuk kriteria penentuan ide awal pada Kelurahan/Desa selain Desa Beji berada pada level *placation* karena pada tahapan ini masyarakat dapat mengusulkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program SLBM namun dalam beberapa hal pemerintah keputusan ada di tangan pemerintah. Namun untuk Beji, Tingkat Partisipasi lebih banyak pada tingkat *Consultation*, karena

meskipun Pemerintah meminta ide dari masyarakat dan Keputusan berada pada Pemerintah, karena berbagai kendala yang ada di pelaksanaan

b. RPA (Rapid Participatory Assessment).

Kegiatan pemetaan swadaya merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan Program SLBM. Pemetaan sanitasi ini, ada beberapa tahapan yaitu Time line, Ladder, Transect Walk, Venn diagram, problem tree sampai dengan Community self selection stakeholder meeting, dimana proses ini biasa disebut RPA (Rapid Participatory Assessment). Dimana metode ini bertujuan untuk teridentifikasinya problem sanitasi dan keinginan masyarakat untuk memecahkannya atas dasar kemampuan sendiri yang dilakukan secara partisipatif. Dimana variabel yang diukur adalah : pengalaman membangun infrastruktur kampung, kesiapan masyarakat berkontribusi, kelayakan teknis untuk infrastruktur sanitasi, kesiapan lembaga untuk mengelola dan prioritas perbaikan sanitasi.

Dari uraian di atas jika dibandingkan dengan teori Arnstein, maka tingkatan partisipasi untuk kriteria pemetaan swadaya berada pada level *partnership atau kemitraan* karena masyarakat dapat melakukan kegiatan itu sendiri namun tetap mengikuti aturan yang ada.

## 2. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan hal yang penting pada pelaksanaan kegiatan karena dengan pengambilan keputusan yang tepat kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pengambilan keputusan juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Masyarakat akan merasa ikut memiliki andil dalam kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya jika terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini pengambilan keputusan dalam tingkat partisipasi meliputi dua kriteria yaitu pemilihan jenis kegiatan dan pemilihan anggota KSM.

a. Pemilihan Jenis Kegiatan

Pemilihan jenis kegiatan Program SLBM dilakukan dalam serangkaian pertemuan RPA. Dimana pertemuan ini dilaksanakan Desa Beji dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing Kelurahan baik dari Kelurahan Kampungdalem, Karangwaru, Sembung.

Kegiatan pemilihan jenis kegiatan dilakukan pada tanggal 2 Mei 2011 bertempat di Balai Pertemuan Desa Beji, dengan jumlah yang hadir sebanyak 28 orang meliputi peserta laki-laki 19 orang, dan peserta perempuan 6 orang.

Kemudian dari hasil pemilihan jenis kegiatan, dilakukan pleno di wilayah masing-masing dengan mengundang masyarakat sasaran. Jika dibandingkan dengan teori Arnstein maka tingkat partisipasi untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan jenis kegiatan anggota berada pada *delegated power* atau pelimpahan kekuasaan karena dalam hal ini masyarakat sudah diberi kewenangan untuk menentukan jenis kegiatan yang dipilih, namun untuk Desa Beji Pemerintah meminta ide dari masyarakat dan Keputusan berada pada Pemerintah, karena berbagai kendala yang ada di pelaksanaan, sehingga tingkat Partisipasinya adalah *Consultation*

b. Pemilihan Anggota

Anggota KSM dipilih secara langsung oleh masyarakat pada forum rapat yang dihadiri masyarakat sasaran program termasuk pula pemilihan Ketua, Sekretaris dan Pengurus KSM lainnya. Kelembagaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang telah terbentuk di masing-masing Kelurahan berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya bisa dibagi menjadi 2 yaitu Panitia Pembangunan dan Badan Pengelola. Kelembagaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di masyarakat disebut sebagai kelompok swadaya masyarakat / KSM-SLBM.

Panitia Pembangunan akan bertanggung jawab mulai dari persiapan sampai konstruksi selesai. Tugas-tugas yang harus dilakukan antara lain: mengumpulkan iuran pembangunan, belanja material, pelaksanaan konstruksi. Tugas panitia pembangunan akan selesai ketika pekerjaan konstruksi selesai dan bangunan sudah diserahkan.

Badan Pengelola akan bertanggungjawab pada pasca konstruksi untuk pengoperasian dan perawatan instalasi pengelola limbah termasuk perpipaan. Tugas-tugasnya antara lain: mengumpulkan iuran pengguna, pengoperasian dan perawatan akan diserahkan kepada badan pengelola.

Jika dibandingkan dengan teori Arnstein maka tingkat partisipasi untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan anggota berada pada *delegated power* atau pelimpahan kekuasaan karena dalam hal ini masyarakat sudah diberi kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi anggota dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

## 3. Pembiayaan

Sebagaimana dengan Petunjuk pelaksanaan program bahwa, pembiayaan program berasal dari Pemerintah, Pemerintah daerah dan swadaya masyarakat. Pembiayaan dalam penelitian meliputi dua kriteria yaitu pembiayaan untuk kegiatan dan pembiayaan pemeliharaan.

a. Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan untuk kegiatan SLBM di 4 Kelurahan berasal dari Pemerintah melalui APBN, Pemerintah daerah sebesar 10 % dari total dana APBN, dan berasal dari swadaya masyarakat baik dalam bentuk *in-kind* dan *in-cash*. *In-kind* /natura berupa tenaga, material lokal, atau peralatan yang diperoleh dari masyarakat desa. Biaya yang berasal dari pemerintah berasal dari APBD Kabupaten serta APBN. Daftar pembiayaan yang dibutuhkan serta jumlah pendapatan yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 3 Pembiayaan untuk kegiatan Program SLBM di Kabupaten Tulungagung

KSM	Kegiatan	Lokasi	Pembiayaan				Total
			In kind	In cash	APBN	APBD Kab	
KSM Podo Nggawe Kampungdalem	Pembangunan MCK +	RW 2 RT 3	1.000.000	8.500.000	179.093.900	17.909.100	206.503.000
KSM ESTU Karangwaru	Pembangunan MCK ++	RW 7 RT 4,5	2.000.000	1.000.000	208.400.000	20.860.000	232.260.000
KSM Kali Song Guyub Rukun Sembung	Pembangunan IPAL	RW 3 RT 4	3.000.000	1.500.000	204.545.454	20.454.545	229.499.999
KSM Guyub Rukun Beji	Pembangunan MCK ++	RW 3 RT 2	1.150.000	1.650.000	144.882.000	14.488.200	162.170.200
KSM Karya Bersama Beji	Pembangunan IPAL	RW 4 RT 1,2,3	1.900.000	2.900.000	194.323.600	45.676.600	244.800.200

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Berdasarkan dari uraian diatas, menunjukkan bahwa sebgaiian besar partisipasi dari masyarakat dalam bentuk *incash* relative kecil, kecuali Kelurahan Kampungdalem dan Desa Beji. Hal ini disebabkan, bahwa di Kelurahan Kampungdalem, terdapat beberapa tokoh masyarakat yang memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dengan nilai relative cukup besar. Dimana partisipasi ini digunakan untuk peninggian jalan menuju lokasi MCK +. Sedangkan untuk Desa Beji partisipasi cukup banyak dari Kepala Desa, Sedangkan untuk desa lainnya partisipasi relative kecil (bekisar 2 s/d 8 %), namun tidak hanya berasal dari iuran masyarakat dalam bentuk dana tetapi juga dalam bentuk tenaga yang setidaknya hal ini mengurangi biaya untuk tukang/honorarium orang kerja (HOK), karena masyarakat sasaran adalah masyarakat berpenghasilan rendah sehingga masih relative sedikit berpartisipasi dalam bentuk uang.

Jika dibandingkan dengan teori Arnstein, maka tingkat partisipasi masyarakat untuk pembiayaan kegiatan berada pada tingkat *consultation* karena masyarakat mulai ikut membiayai meskipun dalam porsi yang sangat kecil.

#### b. Pembiayaan Pemeliharaan

Pembiayaan pemeliharaan atas sarana yang dibangun serta biaya pemeliharaan seyogyanya berdasarkan pada iuran masyarakat. Namun demikian dari keempat Kelurahan termaksud yang telah berjalan dengan baik untuk operasional pemeliharannya adalah pada Kelurahan Kampungdalem, sedangkan untuk lainnya biaya pemeliharaan sebagian di bebaskan pada kas RT, dan bahkan ada pengelola yang mengatakan bahwa mereka akan menarik biaya bila memang nantinya ditemukan masalah waktu operasional kegiatan.

Jika dibandingkan dengan teori Arnstein, maka partisipasi masyarakat pada Kelurahan Kampungdalem berada pada *delegated power* karena biaya pemeliharaan berasal dari masyarakat sepenuhnya, Karangwaru dan Beji (MCK) berada pada tingkat *consultation* karena masyarakat mulai ikut membiayai meskipun dalam porsi yang masih sangat kecil. Namun demikian untuk 2 wilayah lainnya yaitu Beji (IPAL) dan Kelurahan Sembung pada tingkat *therapy* karena sampai saat ini tidak ada iuran yang dimanfaatkan untuk pemeliharaan, namun rencana ada apabila ada keluhan/permasalahan.

#### 4. Mobilisasi Tenaga

Partisipasi masyarakat ini timbul karena masyarakat merasa memiliki dan membutuhkan program SLBM. Dalam penelitian ini mobilitas tenaga dalam tingkat partisipasi meliputi dua kriteria yaitu mobilitas tenaga dalam rapat warga dan pelaksanaan kegiatan fisik.

a. Rapat Warga

Pada saat awal kegiatan SLBM Kelurahan Karangwaru, Beji, sangat mudah digerakkan untuk mengikuti rapat sosialisasi/ rembug desa untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu masyarakat yang belum tertarik diajak oleh warga yang lain untuk mengikuti rapat sosialisasi, sehingga kegiatan SLBM di Kelurahan Karangwaru dan Beji dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan dalam memobilisasi warga. Sedangkan di Kelurahan Sembung dan Kampungdalem pada awal kegiatan sangat sulit digerakkan untuk mengikuti rapat/rembug kesiapan masyarakat. Masyarakat belum mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan, oleh karena itu fasilitator berfungsi sebagai pemberi informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui program SLBM.

Melalui program SLBM diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan dapat menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan perilaku hidup bersih. Peran fasilitator sebagai penggerak dalam program ini sangat dibutuhkan sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi. Fasilitator bekerjasama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa tersebut, memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat pada akhirnya menjadi tertarik dan ikut berpartisipasi dalam program ini.

Jika dibandingkan dengan teori Arnstein, maka partisipasi masyarakat di Kelurahan Beji dan Karangwaru dalam mobilisasi tenaga pada saat rapat warga berada pada level *delegated power* karena masyarakat tergerak sendiri untuk ikut serta dalam kegiatan. Sedangkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Kampungdalem dan Sembung berada pada level *partnership* atau kerjasama karena pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk memobilisasi warga sebanyak-banyaknya.

b. Pelaksanaan Kegiatan Fisik

Mobilisasi tenaga pada saat pelaksanaan kegiatan fisik di wilayah Kelurahan Karangwaru, maupun Desa Beji relative lebih mudah karena semangat guyub rukun yang masih kental di masyarakat. Karena sebagian dari mereka sadar akan manfaat program dimaksud bagi mereka. Disamping itu masyarakat di ketiga wilayah tersebut khususnya di Karangwaru dan Beji telah terbiasa dengan kegiatan pemberdayaan sehingga tingkat kegotongroyongan yang dimiliki relative tinggi. Sedikit berbeda dengan upaya gotong royong di Kelurahan Sembung dan Kampungdalem, karena kesibukan warganya dan lingkungan tempat tinggalnya maka hanya beberapa masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan fisik, namun demikian sebagian dari mereka juga banyak yang sadar untuk membantu memberikan makanan kecil pada saat pembangunan, artinya semua berpartisipasi baik dalam bentuk fisik maupun bantuan makanan/minuman.

Jika dibandingkan dengan teori Arnstein, maka partisipasi masyarakat dalam mobilisasi tenaga pada saat pelaksanaan kegiatan fisik berada pada level *delegated power* karena masyarakat telah tergerak sendiri untuk ikut serta membantu dalam pelaksanaan kegiatan fisik termasuk memberikan bantuan makanan minuman.

## 5. Penyelesaian Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan SLBM sering muncul berbagai masalah. Dalam penelitian ini penyelesaian masalah dalam tingkat partisipasi meliputi tiga kriteria yaitu penyelesaian masalah pada saat forum warga, pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan.

a. Saat rapat warga

Masalah yang timbul pada saat rapat warga secara umum adalah mengenai anggapan bahwa masyarakat pemilik tanah yang dipakai bangunan untuk sanitasi bahwa penggunaan tanah dimaksud akan diberi ganti rugi oleh Pemerintah, padahal di tahap awal program pemilik tanah telah menandatangani berita acara hibah tanah ke desa untuk dimanfaatkan sebagai lokasi sarana sanitasi SLBM. Permasalahan ini terjadi di Desa Beji, dan Karangwaru. Adapun untuk Kelurahan Kampungdalem kebetulan lokasi yang dibangun pada tanah gendom, dan di Kelurahan Sembung di jalan

Disamping muncul permasalahan lain di Kelurahan Sembung, bahwa dengan adanya program SLBM maka kegiatan pavingisasi di Jalan terhambat, karena pembangunan sarana sanitasi IPAL dilaksanakan di tengah jalan.

Untuk penyelesaian masalah saat forum warga ini, pemerintah dan fasilitator turut serta memecahkan masalah. Pemerintah dan fasilitator memberikan pengertian kepada warga bahwa tanah yang warga yang digunakan untuk lokasi merupakan bentuk hibah, dan memberikan masukan kepada Pemerintah Desa untuk memberikan semacam tali asih kepada warga pemberi hibah.

Selanjutnya untuk terhambatnya pavingisasi Karena pembangunan IPAL di Sembung, maka Pemerintah memberikan arahan pada warga bahwa kegiatan paving sementara dihentikan menunggu kegiatan pembangunan IPAL selesai.

Jika dibandingkan dengan teori Arnstein, maka partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah saat forum warga berada pada *level partnership* atau kemitraan karena masih ada kerja sama saat penyelesaian masalah antara masyarakat dan pemerintah.

**b. Pelaksanaan Kegiatan**

Masalah yang timbul pada saat pelaksanaan kegiatan fisik adalah hari efektif untuk pelaksanaan pekerjaan fisik. Masyarakat umumnya kompak bergotong royong menyelesaikan kegiatan pada saat hari libur.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan fasilitator memberikan saran jika kegiatan pada hari kerja tetap dilaksanakan pada hari kerja namun dengan sistem bergiliran antara warga desa. Jika dibandingkan dengan teori Arnstein, maka partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah pada pelaksanaan kegiatan berada pada level *partnership* atau kemitraan karena dalam hal ini ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat penentuan hari kerja.

**c. Pemeliharaan**

Untuk pemeliharaan bangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 di Kelurahan Kampungdalem berada pada kategori sangat baik karena bilik yang ditempat I diberikan tanggungjawab kebersihannya pada 2 s/d 3 KK untuk pemeliharaan kebersihannya. Selanjutnya untuk lokasi MCK di Karangwaru dan Beji diserahkan pada satu orang yang memang tidak mendapat honor, sehingga kondisi yang ditemukan bahwa kurang bersih. Sedangkan untuk IPAL relative tidak ada upaya untuk pemeliharaan karena warga menyerahkan semuanya kepada operator/penanggungjawab IPAL,

di	2	Nama KSM	Kegiatan	Lokasi	Kondisi
		Kelurahan Kampungdalem "Podho Nggawe"	Pembangunan sarana MCK +	RW 2 RT 3	Baik, bersih dan dimanfaatkan
		Kelurahan Karangwaru "Estu"	Pembangunan sarana MCK ++	RW 7 RT 4,5	Baik, Kurang Bersih, dimanfaatkan
		Kelurahan Sembung "Kalisong Guyub Rukun"	Pembangunan sarana IPAL	RW 3 RT 4	Baik, lingkungan bersih
		Desa Beji "Karya Bersama"	Pembangunan sarana MCK	RW 3 RT 2	Baik, Kurang Bersih, jarang dimanfaatkan
		Desa Beji "Guyub Rukun"	Pembangunan sarana IPAL	RW 4 RT 1,2,3	Baik, lingkungan kurang bersih

penerima manfaat IPAL belum ada partisipasi untuk pemeliharaan. Pada Tabel 4.16 dapat dilihat kondisi bangunan yang telah dibangun pada Tahun 2011 di 5 Lokasi SLBM.

Tabel 4 Kondisi Bangunan pada Program SLBM di Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk partisipasi masyarakat pada proses perencanaan Desa Beji dan Karangwaru relative lebih baik, namun demikian pada proses pemeliharaan partisipasi masyarakat di Kelurahan Kampungdalem relative lebih baik dibandingkan kelima lokasi lainnya. Sehingga berdampak pada kondisi kebersihan lokasi.

**4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil analisa menunjukkan bahwa tingkat Partisipasi Masyarakat penerima Program dalam semua tahapan, relative yang lebih baik ditemukan di wilayah Kelurahan Kampungdalem, hal ini dikarenakan dari aspek operasional dan pemeliharaan relative tertata dengan baik dan masyarakat telah memberikan kontribusi yang cukup, namun untuk keempat lokasi lainnya pada aspek operasional dan pemeliharaan perlu untuk lebih dioptimalkan. Untuk itu Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang berkelanjutan, khususnya terhadap prasarana sanitasi diharapkan dapat terus berjalan dan berkelanjutan juga, tidak hanya sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan, namun diharapkan sampai dengan tahap pemeliharaan dan pengawasan untuk menjamin terpeliharanya fungsifungsi prasarana yang sudah terbangun. Disamping itu perlu Peningkatan kapasitas fasilitator lapangan terutama fasilitator yang direkrut dari masyarakat, agar mampu menggerakkan masyarakat baik dari aspek perencanaan sampai dengan operasional dan pemeliharaan.

## **5. REFERENSI**

- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Herawatty, Ratna. 2006. Strategi Peningkatan Partisipasi Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi. *Thesis*. ITS. Surabaya.
- Huda. Miftakhul. 2011. Implementasi Kebijakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. *Thesis*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Nazir, Moh.2009. *Metode Penelitian*.Bandung : Ghalia Indonesia
- Panudju, Bambang .1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni
- Slamet. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi pembangunan masyarakat*. Jakarta : Pustaka Belajar
- Surotinojo, I. 2009. Partisipasi Masyarakat dalam program Sanimas di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Gorontalo.*Thesis*. Universitas Diponegoro. Semarang



*Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan  
Semarang, 11 September 2012*